

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia menjadi topik bahasan yang selalu menarik untuk dikaji, dengan tuntutan atas akuntabilitas lembaga publik yang semakin besar baik di lembaga publik pusat maupun daerah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa masih terdapat laporan keuangan dari lembaga publik yang mendapatkan opini kurang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) salah satunya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Dalam rangka menegakkan tanggung jawab terhadap akuntabilitas khususnya pada kinerja finansial, pemerintah daerah diharuskan bersikap transparan dengan cara mempublikasikan laporan keuangannya kepada pemangku kepentingan, sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengandalkan laporan keuangan yang terpublikasikan tersebut sebagai bahan acuan mengambil keputusan. Oleh karena itu, keterandalan saat pelaporan keuangan merupakan syarat penting yang harus dipenuhi. Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyebutkan bahwa laporan keuangan yang baik syaratnya yaitu;

1. Andal, yang berarti bahwa informasi yang dilampirkan dalam laporan keuangan telah sesuai dengan fakta yang terjadi secara jelas, dan jujur serta bebas dari kesalahan material.
2. Relevan, jika informasi yang dilampirkan pada laporan keuangan harus bisa memberikan umpan balik atau dapat memengaruhi kebijakan yang diambil pengguna, membantu pihak pengguna untuk dapat memprediksi hasil yang akan didapat melalui peristiwa masa lalu dan sekarang.
3. Dapat dibandingkan, informasi yang terlampir pada laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan laporan keuangan entitas lain, untuk dapat dilakukan evaluasi.
4. Dapat dipahami, informasi yang terlampir pada laporan keuangan harus mudah

dipahami oleh pemangku kepentingan.

Pentingnya pengawasan keuangan bertujuan untuk memastikan agar anggaran yang telah diatur benar-benar terlaksana, memastikan pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah diatur dan dapat dipertanggungjawabkan, serta meminimalisir terjadinya salah saji material yang disebabkan kelalaian dalam proses penyusunan laporan keuangan. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa secara pribadi langsung dilokasi serta melakukan inspeksi kepada pelaksana secara langsung. Semakin baik pengawasan keuangan dilakukan dapat mempengaruhi kualitas laporan yang dihasilkan karena dengan pengawasan tersebut dapat meminimalisir fraud ataupun kesalahan material dalam proses penyusunan.

Perkembangan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatan yang begitu luas dan tidak terbatas juga dapat menjadi kesempatan bagi banyak pihak untuk dapat mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat. Sehingga dapat mewujudkan kualitas pemerintahan yang bersih dan transparan. Transparansi yang baik juga akan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran dan salah saji material dalam proses pengelolaannya.

Dalam upaya untuk mendapatkan kualitas informasi laporan keuangan yang baik diperlukan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Jika suatu organisasi memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang dapat diandalkan serta memiliki kemampuan profesionalitas yang sangat baik dengan dukungan struktur organisasi yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan organisasi tersebut. Pegawai yang dapat lebih lama bertahan dalam organisasi adalah yang memiliki komitmen besar terhadap organisasinya dibandingkan dengan pegawai yang rendah komitmen pada organisasinya.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) yang komperhensif, yang selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). LKPD yang harus dilaporkan setiap tahunnya terdiri atas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Dilihat dari opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember tahun anggaran 2016 hingga tahun anggaran 2019. di tahun anggaran 2016 LKPD Kabupaten Jember memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), di tahun anggaran 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tahun anggaran 2018 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan di tahun anggaran 2019 LKPD Kabupaten Jember memperoleh opini terendah yakni Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer). Penyebab opini disclaimer diberikan apabila auditor belum dapat meyakinkan dirinya bahwa laporan yang disajikan telah wajar, dan terdapat pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen organisasi sehingga auditor/badan pemeriksa tidak memiliki cukup bukti yang meyakinkan dalam proses pemeriksaan (Surabaya.bpk.go.id *diakses pada* 13 Juli 2020).

Pemberian opini tersebut dikarenakan terjadi fraud atau penyimpangan penyajian laporan keuangan pemerintah. Karena dari hasil pengawasan DPRD banyak temuan panitia terkait dugaan penyalahgunaan anggaran. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI juga menyatakan ada penganggaran dan realisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap tidak tepat dan melanggar peraturan perundangan. Banyak kendala yang dialami Tim BPK dan DPRD Jember saat melakukan pengawasan terhadap tata kelola keuangan di Kabupaten Jember. Salah satu kendala dirasakan pada saat DPRD Jember mengundang OPD Jember dalam rangka membahas keuangan tetapi tidak hadir atau mangkir. Kasus tersebut menjadi bukti buruknya transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan DPRD Jember (Surabaya.bpk.go.id *diakses pada* 13 Juli 2020).

Penelitian ini menggunakan empat faktor yang diduga mempengaruhi keterandalan informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Empat faktor tersebut ialah pengawasan keuangan, pemanfaatan TI, komitmen organisasi dan kompetensi SDM yang telah dijelaskan di atas. Berdasarkan faktor-faktor tersebut penelitian ini ingin mengetahui **“Pengaruh Pengawasan Keuangan, Pemanfaatan TI, Komitmen Organisasi dan Kompetensi SDM terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari teori atau permasalahan yang telah dijelaskan di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengawasan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember?
2. Apakah pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember?
4. Apakah kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk;

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan keuangan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan TI kapasitas SDM terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya menyangkut permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu pengawasan keuangan, pemanfaatan TI, komitmen organisasi dan kapasitas SDM dan keterandalan pelaporan keuangan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat lebih memahami hubungan maupun pengaruh antara pengawasan keuangan, pemanfaatan TI, komitmen organisasi dan kapasitas SDM dengan keterandalan laporan keuangan.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait di pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas laporan keuangannya, terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan.